EVALUASI PELAKSANAAN PEMBINAAN EKS NAPITER DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KEMBALI PRODUKTIF DI MASYARAKAT

Fransiskus Novaliansen Bara, Isnawati, S. Roy Hendrayanto

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Alamat Instansi

E-mail : fransbara43@gmail.com

ABSTRAK.

Dalam konteks hukum dan kebijakan, program pembinaan bagi eks napiter berlandaskan pada prinsip-prinsip pemasyarakatan yang bertujuan untuk memulihkan dan membina pelaku agar mampu menjalani kehidupan yang produktif dan tidak mengulangi kesalahan. Penelitian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan program pembinaan eks napiter dalam meningkatkan kualitas hidup mereka di masyarakat dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat eks napiter untuk kembali produktif setelah menjalani masa pembinaan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum. Program pembinaan eks napiter di Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke masyarakat. Melalui pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial, dan program deradikalisasi, banyak eks napiter berhasil mengembangkan kemandirian ekonomi dan meninggalkan ideologi ekstrem. faktor-faktor pendukung dan penghambat berperan signifikan dalam menentukan keberhasilan proses reintegrasi mereka. Dukungan

keluarga, penerimaan masyarakat, bantuan ekonomi, dan program pembinaan yang terstruktur merupakan faktor-faktor utama yang mendorong eks napiter untuk hidup mandiri dan berkontribusi secara positif.

Kata kunci: Pembinaan, Eks Napiter, Produktif.

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF FORMER TERRORIST REHABILITATION IN IMPROVING THE QUALITY OF LIFE AND RETURNING TO PRODUCTIVITY IN SOCIETY

ABSTRACT.

In the context of law and policy, the rehabilitation program for former terrorists is based on the principles of correctional practice aimed at restoring and rehabilitating offenders so that they can lead productive lives and not repeat their mistakes. This study analyzes the effectiveness of the implementation of the rehabilitation program for former terrorists in improving their quality of life in society and the factors that support and hinder former terrorists from becoming productive again after undergoing rehabilitation. This research utilizes

normative research, a process to discover legal rules, legal principles, and legal doctrines to address legal issues. The rehabilitation program for former terrorists in Indonesia plays an important role in improving their quality of life and facilitating their reintegration into society. Through skills training, psychosocial support, and deradicalization programs, many former terrorists have successfully developed economic independence and left extremist ideologies. Supporting and hindering factors play a significant role in determining the success of their reintegration process. Family support, community acceptance, economic assistance, and structured mentoring programs are the main factors that encourage former terrorists to live independently and contribute positively.

Keywords: *Coaching, Ex-terrorists, Productive.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan ketertiban sosial. Penanganannya tidak hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga pembinaan terhadap narapidana terorisme (napiter) pasca hukuman. Eks napiter kerap menghadapi tantangan dalam reintegrasi, seperti stigma negatif, akses ekonomi terbatas, dan penerimaan sosial yang rendah. Untuk itu, program pembinaan eks napiter sangat penting agar mereka tidak kembali ke jalan kekerasan dan mampu berkontribusi positif di masyarakat.

Di Indonesia, program pembinaan melibatkan Kemenkumham, BNPT, LSM, dan organisasi keagamaan.

Program ini mencakup pelatihan kerja, pendampingan psikososial, dan edukasi keagamaan dengan pendekatan deradikalisasi. Namun, efektivitas program sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan serta dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Banyak eks napiter mengalami kesulitan ekonomi dan sosial, yang meningkatkan risiko mereka kembali ke jaringan teror.

Pembinaan eks napiter juga merupakan strategi penting dalam mencegah terorisme berkelanjutan. Reintegrasi yang berhasil dapat memperkuat stabilitas sosial dan memberi teladan bagi orang lain. Namun, tantangan di lapangan masih besar, seperti minimnya sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan pendekatan deradikalisasi yang belum sepenuhnya menyentuh akar ekstremisme.

Selain itu, stigma dari masyarakat menjadi hambatan besar dalam reintegrasi. Diskriminasi dalam dunia kerja dan interaksi sosial menurunkan semangat eks napiter untuk berubah. Padahal, dukungan masyarakat sangat penting agar mereka bisa kembali menjalani hidup yang sah dan produktif. Secara hukum, pembinaan eks napiter didasarkan pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan untuk mendorong perubahan positif.

Program pembinaan yang berjalan saat ini memerlukan peningkatan dalam hal sinergi antarinstansi.

Koordinasi antara BNPT, Kemenkumham, dan lembaga lainnya belum sepenuhnya efektif, sehingga sering terjadi tumpang tindih atau kekosongan dalam peran yang seharusnya diambil oleh masing-masing pihak. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum hingga masyarakat, dalam memberikan dukungan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, teknologi dan inovasi juga dapat menjadi alat yang mendukung program pembinaan eks napiter. Penggunaan platform digital untuk pelatihan keterampilan atau bimbingan psikososial dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitas program. Selain itu, teknologi deteksi dini dapat membantu pihak berwenang mengidentifikasi eks napiter yang berisiko kembali terpapar ideologi ekstremis, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat.

Penting juga untuk mengembangkan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses reintegrasi. Program yang hanya mengandalkan intervensi pemerintah sering kali tidak cukup untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi eks napiter. Masyarakat sebagai bagian dari solusi dapat memberikan ruang sosial yang lebih terbuka, sehingga eks napiter dapat merasakan penerimaan kembali sebagai anggota yang setara.

Evaluasi terhadap program pembinaan harus dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitasnya. Pengukuran yang tepat terhadap indikator keberhasilan seperti tingkat reintegrasi sosial, kestabilan psikologis, dan pencapaian ekonomi eks napiter akan memberikan gambaran nyata mengenai keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Berdasarkan evaluasi ini, perbaikan dapat dilakukan untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan eks napiter yang terus berkembang.

Dari sisi kebijakan, perlu ada penyesuaian terhadap program pembinaan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Program yang terukur dan berbasis hasil akan lebih efektif dalam mencegah rekrutmen kembali ke dalam kelompok teroris dan mempercepat reintegrasi eks napiter ke dalam masyarakat. Dukungan terhadap pembinaan pasca penjara tidak hanya meringankan beban eks napiter, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Penelitian ini berfokus pada evaluasi program pembinaan eks napiter, terutama dalam aspek peningkatan kualitas hidup mereka dan kemampuan untuk kembali produktif di masyarakat. Diharapkan hasilnya dapat menjadi masukan untuk perbaikan kebijakan pembinaan yang lebih efektif dan responsif terhadap kondisi di lapangan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program pembinaan eks napiter dalam meningkatkan kualitas hidup mereka di masyarakat?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat eks napiter untuk kembali produktif setelah menjalani masa pembinaan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kajian secara sistematis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan dan efektivitas norma hukum dalam konteks tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji norma-norma hukum yang terkait dengan membahas pelaksanaan program pembinaan eks napiter dalam meningkatkan kualitas hidup mereka di masyarakat.¹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan

pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan membahas pelaksanaan program pembinaan eks napiter dalam meningkatkan kualitas hidup mereka di masyarakat.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu

Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

- 5) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor PAS-205.PK.01. 05.10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembimbingan Klien Kasus Terorisme.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020–2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung, yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Belanda-Indonesia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum

dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (Analisis isi) serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Program Pembinaan Eks Napiter Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Mereka Di Masyarakat.

Program pembinaan bagi eks narapidana terorisme (eks napiter) memiliki peranan strategis dalam proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Mengingat terorisme merupakan kejahatan ideologis yang kompleks, penyelesaian masalahnya tidak cukup dengan pemidanaan semata. Setelah bebas, para eks napiter sering menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses ekonomi, stigma sosial, dan kurangnya dukungan dari

lingkungan sekitar. Maka dari itu, pembinaan ini tidak hanya menitikberatkan pada pelatihan keterampilan, tetapi juga bertujuan membentuk kembali pola pikir dan nilai-nilai hidup yang selaras dengan kehidupan damai dan bermasyarakat.

Pembinaan eks napiter dilandaskan pada prinsip pemasyarakatan menurut UU No. 12 Tahun 1995, yang menekankan bahwa semua individu, termasuk mantan pelaku tindak pidana terorisme, berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah dan kembali hidup produktif. Program ini memiliki dua fokus utama: deradikalisasi sebagai proses perubahan ideologi, dan reintegrasi sosial-ekonomi agar eks napiter dapat hidup mandiri dan diterima masyarakat.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bersama lembaga pemasyarakatan dan organisasi masyarakat sipil, menjalankan program ini melalui sejumlah komponen berikut:

A. Komponen Program Pembinaan

1. Pelatihan Keterampilan Kerja dan Kemandirian Ekonomi - Menyediakan pelatihan teknis dan wirausaha untuk mengurangi ketergantungan pada jaringan teroris.
2. Pendampingan Psikososial - Meliputi konseling, terapi, dan rehabilitasi untuk mengatasi trauma dan memperkuat keterampilan sosial.

3. Program Deradikalisasi dan Pemahaman Keagamaan - Menekankan ajaran agama yang moderat dan damai melalui kerja sama dengan tokoh agama.

4. Dukungan Reintegrasi Sosial - Melibatkan komunitas agar eks napiter tidak mengalami diskriminasi dan dapat diterima kembali.

Komponen program pembinaan bagi eks napiter disusun secara menyeluruh untuk menjawab berbagai tantangan yang mereka hadapi pasca pemidanaan. Setiap komponen tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi untuk mendorong keberhasilan reintegrasi sosial dan mencegah residivisme. Dengan keterpaduan keempat komponen ini, program pembinaan tidak hanya bertujuan menekan angka residivisme, tetapi juga mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang lebih inklusif, aman, dan berkeadilan.

B. Indikator Efektivitas Program

1. Kemandirian Ekonomi - Eks napiter diharapkan bisa mandiri secara finansial, meskipun masih banyak menghadapi tantangan dalam mengakses modal dan dukungan usaha.
2. Perubahan Ideologis dan Pemahaman Keagamaan - Program deradikalisasi cukup berhasil namun butuh kesinambungan pasca bebas.
3. Penerimaan Sosial dan Dukungan Masyarakat - Dukungan masyarakat sangat

penting, meskipun stigma masih menjadi hambatan besar.

4. Pengurangan Risiko Residivisme
 - Jumlah eks napiter yang kembali ke jaringan radikal menurun, namun risiko tetap ada jika tidak ada dukungan memadai.

Efektivitas program pembinaan eks napiter tidak hanya diukur dari partisipasi mereka dalam kegiatan, tetapi juga dari dampak nyata terhadap kehidupan mereka setelah bebas. Terdapat empat indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan program ini, masing-masing mencerminkan aspek penting dalam proses reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme.

C. Tantangan Program Pembinaan

1. Keterbatasan Dana dan Sumber Daya - Program menyeluruh butuh anggaran besar, yang sering kali tidak mencukupi.
2. Koordinasi Antar Lembaga - Keterlibatan banyak pihak tanpa koordinasi yang kuat dapat mengganggu efektivitas program.
3. Stigma dan Diskriminasi - Pandangan negatif masyarakat menghambat proses reintegrasi sosial eks napiter.

Meskipun berbagai program pembinaan telah dirancang untuk mendukung reintegrasi eks napiter, implementasinya tidak lepas dari sejumlah tantangan struktural dan sosial. Tantangan-tantangan ini, jika tidak ditangani dengan serius, dapat

menghambat efektivitas program dan bahkan meningkatkan risiko kegagalan reintegrasi.

D. Rekomendasi Peningkatan Program

1. Peningkatan Dukungan Ekonomi

Pemerintah perlu memfasilitasi akses modal usaha dan pelatihan keterampilan yang lebih luas, termasuk kemitraan dengan lembaga keuangan dan organisasi non-pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan eks napiter dapat membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

2. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi yang baik antara BNPT, Kemenkumham, dan organisasi sipil diperlukan agar program pembinaan berlangsung terpadu dan berkesinambungan, termasuk sistem pemantauan pasca pembebasan.

3. Edukasi Masyarakat

Untuk menekan stigma, masyarakat perlu diberi pemahaman yang benar mengenai tujuan pembinaan dan pentingnya reintegrasi. Edukasi publik akan membantu menciptakan ruang sosial yang lebih inklusif dan kondusif bagi eks napiter.

Untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan eks napiter, diperlukan tiga strategi utama. Pertama, dukungan ekonomi harus

diperluas melalui akses modal usaha dan pelatihan keterampilan berkelanjutan. Kedua, koordinasi antar lembaga seperti BNPT, Kemenkumham, dan organisasi sipil perlu diperkuat agar program berjalan terpadu dan terus dipantau pasca pembebasan. Ketiga, edukasi masyarakat penting dilakukan untuk mengurangi stigma dan membangun lingkungan sosial yang inklusif bagi proses reintegrasi eks napiter.

B. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Eks Napiter Untuk Kembali Produktif di Masyarakat

Pembinaan terhadap eks narapidana terorisme (eks napiter) di Indonesia bertujuan untuk mengubah perilaku, pola pikir, dan keterampilan mereka agar dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama antara BNPT, lembaga pemasyarakatan, dan organisasi sosial, dengan menekankan pada deradikalisasi, kemandirian ekonomi, dan reintegrasi sosial. Keberhasilan pembinaan sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung maupun penghambat yang bersifat kompleks dan saling terkait.

1. Faktor-Faktor yang Mendukung Eks Napiter untuk Kembali Produktif

a. Dukungan dari Keluarga dan Masyarakat

Keluarga yang menerima dan masyarakat yang terbuka memberikan lingkungan yang

aman dan suportif bagi eks napiter untuk beradaptasi serta menghindari keterasingan sosial.

b. Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Ekonomi

Pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar serta bantuan permodalan menjadi bekal penting bagi eks napiter untuk membangun usaha atau mencari pekerjaan.

c. Pendampingan Psikososial

Layanan psikologis dan sosial membantu eks napiter mengatasi trauma, membangun kesehatan mental, dan menjalin hubungan sosial yang sehat.

d. Program Deradikalisasi yang Terstruktur

Program deradikalisasi berbasis agama dan nilai toleransi membantu eks napiter melepaskan ideologi ekstrem dan mendorong keterlibatan damai dalam masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Eks Napiter untuk Kembali Produktif

a. Stigma Sosial dan Diskriminasi

Persepsi negatif masyarakat menghambat akses eks napiter ke pekerjaan dan kehidupan sosial yang normal, memperparah isolasi dan tekanan psikologis.

b. Keterbatasan Akses Ekonomi

Sulitnya memperoleh pekerjaan dan modal usaha membuat banyak eks napiter tetap berada dalam kondisi ekonomi rentan.

c. Ketergantungan Ekonomi pada Keluarga

Ketidakmandirian finansial menyebabkan beban dalam keluarga dan membuat eks napiter rentan terhadap pengaruh kelompok radikal.

d. Ketidakmampuan Mengelola Stres dan Tekanan Sosial

Trauma dan gangguan mental membuat sebagian eks napiter kesulitan mengikuti program pembinaan secara konsisten.

e. Keterbatasan Program Pembinaan

Keterbatasan dalam cakupan, durasi, dan sumber daya pembinaan menyebabkan program tidak berkelanjutan, sehingga perubahan yang dicapai sulit dipertahankan.

Program pembinaan eks napiter di Indonesia mencakup pendekatan holistik yang melibatkan deradikalisasi, pelatihan kerja, dan dukungan sosial-psikologis. Faktor keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga, masyarakat, serta tersedianya pelatihan dan bantuan ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, tantangan seperti stigma sosial, keterbatasan akses ekonomi, dan kurangnya keberlanjutan program masih menjadi hambatan besar. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih terintegrasi, dukungan masyarakat yang inklusif, serta penguatan sumber daya pembinaan agar eks napiter benar-benar dapat kembali produktif dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat secara damai dan konstruktif.

Reintegrasi eks narapidana terorisme (eks napiter) ke dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat.

Faktor-faktor pendukung meliputi dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat yang berperan penting dalam memotivasi eks napiter untuk berubah serta memberikan lingkungan yang stabil dan aman. Selain itu, pelatihan keterampilan dan bantuan ekonomi juga menjadi komponen vital dalam membekali mereka dengan kemampuan teknis dan akses permodalan untuk memulai usaha mandiri. Pendampingan psikososial turut membantu proses pemulihan mental dan sosial eks napiter, sementara program deradikalisasi yang terstruktur berkontribusi pada perubahan ideologi dengan pendekatan keagamaan yang moderat dan toleran. Di sisi lain, proses reintegrasi sering kali terhambat oleh stigma sosial dan diskriminasi yang menyebabkan eks napiter mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan dan diterima kembali dalam komunitas. Keterbatasan akses ekonomi, termasuk minimnya peluang kerja dan sulitnya memperoleh modal usaha, memperburuk kondisi ini. Ketergantungan ekonomi pada keluarga juga menimbulkan kerentanan finansial, terutama jika keluarga tidak mampu mendukung secara memadai. Selain itu, banyak eks napiter mengalami kesulitan dalam mengelola stres dan tekanan sosial

akibat trauma masa lalu, yang dapat mengganggu konsistensi dalam mengikuti program pembinaan. Hambatan lainnya adalah keterbatasan program pembinaan itu sendiri, baik dari sisi cakupan, durasi, maupun keberlanjutannya, yang sering kali terkendala oleh kurangnya sumber daya dan sistem pemantauan pasca bebas yang belum optimal.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa program pembinaan eks narapidana teroris (napiter) di Indonesia berperan penting dalam mendukung proses reintegrasi sosial dan peningkatan kualitas hidup mereka melalui pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial, dan deradikalisasi. Keberhasilan program sangat bergantung pada dukungan keluarga, penerimaan masyarakat, serta bantuan ekonomi yang memadai. Namun, efektivitas program ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta kuatnya stigma sosial terhadap eks napiter yang dapat menghambat mereka untuk hidup mandiri dan produktif dalam masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Chair Ramadhan, 2014, Strategi Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Nonpenal, Lisan, Jakarta.
- Ali, M. 2019. Reintegrasi Eks Napiter: Tantangan dan Peluang dalam Pemberdayaan Sosial. Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Basri, T., & Nugroho, A. 2020. Pembinaan dan Deradikalisasi Eks Napiter di Indonesia: Perspektif Sosial dan Hukum. Rajawali Pers, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa. Jakarta.
- Frassminggi Kamasa, 2015, Terorisme Kebijakan kontra terorisme Indonesia, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Handoko, S. 2018. Membangun Kembali Kehidupan Eks Narapidana Terorisme melalui Pembinaan dan Pelatihan Kerja. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Jonaedi Efendi, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group, Depok.
- Mangunhardjana. A.M. 2006. Pembinaan: Arti dan Metodenya. Kanisius. Yogyakarta.
- Nurdin, M., & Wahyuni, L. 2021. Strategi Reintegrasi Sosial Eks Napiter di Tengah Masyarakat. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Prasetyo, A. 2017. Deradikalisasi dan Pemulihan Psikologis Eks Napiter: Kajian Efektivitas Program. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Setiawan, R. 2019. Dampak Program Deradikalisasi pada Eks Napiter: Studi Kasus di Jawa Tengah. Universitas Indonesia Press, Depok.
- Sudarsono. 1999. Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja. Bina Aksara. Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Zainal, A. 2022. Penguatan Peran BNPT dalam Pembinaan dan Deradikalisasi Eks Napiter di Indonesia. Pustaka Pelajar, Jakarta.

Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme Menjadi
Undang-undang.

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2022 Tentang
Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77
tahun 2019 tentang Pencegahan
Tindak Pidana Terorisme dan
Pelindungan Terhadap Penyidik,
Penuntut Umum, Hakim, dan
Petugas Pemasyarakatan.

Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Rencana Aksi Nasional
Pencegahan Dan
Penanggulangan Ekstremisme
Berbasis Kekerasan.

Keputusan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian
Hukum Dan HAM Republik
Indonesia Nomor PAS-205.
PK.01. 05.10 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Umum Pembimbingan
Klien Kasus Terorisme.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
2021 tentang Rencana Aksi

Nasional Pencegahan dan
Penanggulangan Ekstremisme
Berbasis Kekerasan yang
Mengarah pada Terorisme (RAN
PE) Tahun 2020–2024.